

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sampai saat ini kemiskinan masih menjadi problem utama masyarakat dunia yang tak kunjung usai, kemiskinan menjadi beban bagi sebuah negara dalam perputaran roda ekonominya, tidak terkecuali Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang. Oleh karena itu, keberadaannya harus segera dihilangkan atau paling tidak dikurangi agar upaya pembangunan ekonomi yang telah direncanakan dapat tercapai, yakni dalam rangka mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Indonesia dihadapkan pada masalah angka kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan data dari BPS pada Maret 2011 angka kemiskinan sebanyak 30,03 juta jiwa atau 12,49% dari jumlah penduduk Indonesia (BPS 2011). Untuk penduduk miskin di daerah perkotaan BPS mencatat, per Maret 2011 sebanyak 11,05 juta orang turun 0,4% dari Maret 2010 sebesar 11,10 juta orang. Sedangkan di daerah pedesaan per Maret 2011 jumlah penduduk miskin sekitar 18,94 juta orang dibandingkan Maret tahun sebelumnya sebesar 19,93 juta orang.

Kemiskinan tersebut telah membuat daya saing Indonesia melemah terhadap dunia Internasional, dan ini menyebabkan citra dan martabat bangsa dan masyarakat Indonesia menurun. Oleh karena itu masalah kemiskinan harus mendapat perhatian serius dari semua unsur masyarakat (Sumodinigrat, 2002) dalam Multifiah(2007). Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati

kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Hingga kini telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Sebagai contoh, Pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, pemerintah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Prioritas pada penanggulangan kemiskinan dilanjutkan oleh KIB II. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program Penanggulangan kemiskinan di Era Kabinet Indonesia bersatu (KIB) II dibagi dalam berbagai klaster, yaitu: ***Klaster I*** yang meliputi: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN). ***Klaster II*** yang terbagi kedalam dua program: *pertama*, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdiri dari: PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias), PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative), PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas, PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP), Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP), PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), PNPM-

Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK), PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP), PNPM-Mandiri Pariwisata, PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim). Kemudian program yang *kedua* adalah Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif ***Klaster III*** meliputi: Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama (KUBE).

Dari sejumlah program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan fakta kemiskinan yang tersebut di atas menunjukkan bahwa program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan belum berhasil secara efektif sebagaimana yang diharapkan. Dimana sebuah program penanggulangan kemiskinan dinyatakan mampu berperan positif apabila program tersebut mampu mengurangi kemiskinan.

Indonesia dengan total jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa yang mayoritas beragama Islam yakni sekitar 80%. Dengan fakta tersebut, adalah wajar bila akhir-akhir ini berkembang tentang wacana ekonomi Islam di negara ini. Potensi jumlah penduduk Muslim memungkinkan Indonesia untuk menerapkannya. Penulis memahami bahwa sistem ekonomi yang diterapkan saat ini, yakni ekonomi kapitalis tidak mampu membawa bangsa dan negara ini kepada kesejahteraan. Karena sistem tersebut berasal dari Manusia, bukan pencipta. Sementara manusia sendiri lemah, kikir, dan serba terbatas. Aturan yang dibuatnya akan cocok pada sebagian yang satu dan tidak cocok bagi sebagian yang lain. Terbukti dengan adanya berbagai problematika yang tak kunjung usai

yang disebabkan oleh diterapkannya sistem kapitalis tersebut. Mulai dari krisis ekonomi yang berulang, distribusi yang tidak merata yang pada akhirnya mengantarkan kepada kemiskinan, kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin, kecurangan dalam bertransaksi jual beli, dan sebagainya.

Data statistik yang dikeluarkan oleh PBB menunjukkan bahwa ada 6 Miliar manusia yang mendiami bumi: 4,3 Miliar diantaranya tinggal di negara-negara berkembang. Dari Jumlah tersebut, sekitar 3 Miliar manusia hidup di bawah garis kemiskinan (yaitu berpendapatan 2 dollar sehari), sedangkan 1,2 miliar diantaranya hidup dengan pendapatan kurang dari 1 dollar AS sehari. Sebaliknya data statistik menunjukkan bahwa negara-negara Industri menguasai 97% dari seluruh kekayaan dunia. Sedangkan perusahaan-perusahaan multinasional menguasai 90% kekayaan teknologi, produksi dan penjualan. Selain itu 80% keuntungan yang diperoleh dari investasi asing di negara-negara berkembang ternyata mengalir ke 20 negara kaya. Sementara itu, 1/3 penduduk negara berkembang tidak memiliki akses pada air minum yang layak, 1/5 penduduk tidak mempunyai akses pada pelayanan kesehatan yang sederhana. 1/5 anak-anak tidak mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 5 SD. Dan 1/5 pelajar mengalami masalah kurang gizi akibat kemiskinan. Pada saat yang sama, kekayaan tiga orang terkaya di dunia sama dengan total produksi nasional 48 negara termiskin. (Hizbut Tahrir, 2009)

Demikian sistem ekonomi kapitalis menciptakan sebuah kondisi yang menakutkan dan berbagai kerusakan. Berangkat dari prinsip dasar ekonomi yang salah, prinsip tersebut diantaranya: pemisahan agama dari kehidupan, fokus pada

pertumbuhan kekayaan dan mengabaikan distribusinya, serta kebebasan kepemilikan yang mutlak.

Ajaran Islam memberikan peluang yang besar bagi ummatnya dalam mengantisipasi persoalan yang dihadapi dalam bidang sosial dan ekonomi. Ajaran Islam yang relevan dengan hal tersebut adalah Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Zakat adalah fardhu ‘ain, sebagai salah satu Rukun Islam yang diperintahkan dalam Al Qur’an dan sama kerasnya dengan perintah sholat. Kerasnya perintah membayar zakat ini ditunjukkan dalam Al Qur’an dimana kata zakat disebut 30 kali dan 27 kali diantaranya disebut dalam satu ayat bersama-sama dengan kata sholat (Muhammad, 2005). Salah satu surah yang menerangkan hal tersebut adalah QS Al Baqarah ayat 110 yang artinya *“dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat”*. Atau dalam surah Al Mu’minun ayat 1-4 yang artinya *“sungguh memperoleh kemenangan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang berpaling dari hal yang sia-sia dan melaksanakan zakatnya”*. Bahkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam ditegaskan oleh para ahli Fiqih bahwa bagi Muslim yang mampu membayar zakat akan tetapi tidak menunaikannya, hukumnya murtad bahkan harus dibunuh.

Zakat, Infaq, shodaqoh merupakan instrumen yang sangat tepat untuk digunakan sebagai salah satu sumber dana dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Melihat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim dan sisi religi masyarakat yang masih kental. Zakat, infaq, shodaqoh dilaksanakan oleh masyarakat Islam dalam rangka ketaatan kepada Alloh, dalam rangka

membelanjakan hartanya di jalan Allah sebagaimana yang tertulis dalam Alqur'an dan dijelaskan pula dalam as sunnah.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Asbahani dari Imam at-Thabrani, dalam kitab Al-Ausath dan Al-Shaghir, Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekuranganpakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih”.

Hadits tersebut secara eksplisit menegaskan posisi zakat sebagai instrumen pengaman sosial, yang bertugas untuk menjembatani transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Hadits tersebut juga mengingatkan akan besarnya kontribusi perilaku bakhil dan kikir terhadap kemiskinan. (Beik).

Menurut Sabahadin Zaim dalam Tahir (2004) fungsi zakat terhadap kesejahteraan antara lain: menjamin distribusi kembali dari penghasilan. Zakat dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus merupakan instrumen yang efektif untuk pemerataan dan distribusi

Potensi Zakat di Indonesia (Riset tahun 2009) cukup besar, yaitu Riset Habib Ahmed (IRTI-IDB), potensi zakat = 2% dari GDP. GDP yang jumlahnya 5000 triliun kalau diambil 2% berarti Rp. 100 triliun. Pada tahun 2011 ini terjadi kenaikan potensi zakat di Indonesia menjadi sebesar Rp 217 triliun atau 3,14 % dari GDP Indonesia (Hasil Riset BAZNAS, FEM IPB dan IDB 2011). Sedangkan berdasarkan hasil riset Islamic Development Bank (IDB) pada 2010 disebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 100 triliun. Sementara pada tahun

2011, jumlahnya semakin meningkat, potensi zakat mencapai Rp. 217 triliun, dengan perincian Rp. 117 triliun dari rumah tangga dan Rp. 100 triliun dari perusahaan-perusahaan milik Muslim. Dalam warta bulanan BAZ Jatim, disebutkan bahwa pada tahun 2011 potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 Triliun, sementara untuk level dunia mencapai RP. 6 ribu triliun. angka-angka itu bila optimal tergali dan dikelola atau disalurkan dengan baik akan dapat mewujudkan kesejahteraan bersama.

Menurut Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Naharus Surur, Meski jumlah potensinya besar, tetapi jumlah nilai zakat yang terealisasi hanya Rp. 1,2 triliun. Ini artinya kesadaran umat untuk berzakat masih tergolong rendah. Meskipun umat Islam sudah mulai memiliki kesadaran untuk membayar zakat fitrah, namun kesadaran untuk memberikan zakat maal (harta) masih sangat kurang, karena itu Ketua Badan Zakat Nasional (Baznas) Didin Hafiduddin menyatakan, untuk mengatasi kendala itu, umat Islam harus menjadikan zakat sebagai budaya masyarakat. Pengelolaan zakat dari tahun ke tahun bisa dikatakan mengalami peningkatan, Sejak terbitnya UU No.38 tahun 1999 tentang zakat, pengelolaan zakat semakin profesional, sudah banyak BAZ dan LAZ di Indonesia.

Keampuhan ZIS dalam menggulangi kemiskinan tidak bisa diragukan lagi, sebagai contoh keberhasilan ZIS adalah pada zaman pemerintahan Kholifah Umar bin Abdul Aziz. Hanya dalam waktu sekitar dua tahun lima bulan masa pemerintahannya, program ZIS telah terbukti dapat menghilangkan kemiskinan sama sekali di wilayah yang dipimpinnya, bahkan kemudian hasil ZIS yang telah terkumpul, dikirim ke negara tetangga (Afrika Utara) yang masih miskin.

(Anonim, 2004). Selain itu, menurut Aliasussin, dalam Multifiah (2007) pada zaman Rosululloh dan empat Kholifah berikutnya telah terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting yakni sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ummat. Zakat pada masa itu dikumpulkan dari para Muzakki (pemberi zakat) oleh para petugas yang disebut Amil, kemudian disalurkan kepada para Mustahiq (penerima zakat) (Hafidhuddin, 2002).

Pada dasarnya ZIS bukan produk manusia sebagaimana program-program yang lain. Akan tetapi, ZIS adalah produk agama yang langsung berasal dari Sang Pencipta. Oleh karena itu apabila dijalankan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ajaran islam akan menghasilkan kesejahteraan sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rosululloh dan Kholifah Umar bin Abdul Aziz. Karena janji Alloh pasti benar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan dalam judul skripsi: **“Peran Zakat, Infaq, shodaqoh (ZIS) terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Wonocolo dan Sukomanunggal”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana peran lama menerima bantuan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS), tingkat pendidikan, usia, dan jumlah anggota keluarga terhadap peningkatan kesejahteraan maustahiq di kecamatan Wonocolo dan Sukomanunggal Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lama menerima bantuan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS), tingkat pendidikan, usia, dan jumlah anggota keluarga terhadap peningkatan kesejahteraan maustahiq di kecamatan Wonocolo dan Sukomanunggal Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

- Bagi Intelektual, akademisi diharapkan dapat menambah wawasan seputar ekonomi Islam yang sudah mulai berkembang, khususnya tentang ZIS itu sendiri.
- Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana latihan, menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi mengenai peran ZIS terhadap penanggulangan kemiskinan.
- Bagi Masyarakat dan lembaga pengelola zakat, diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran ZIS

1.5 sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Landasan teori tersebut meliputi pengertian zakat, pengertian kemiskinan. Dalam bab ini juga akan menguraikan studi dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan model analisis dari penelitian ini.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, pengukuran variabel yang meliputi identifikasi variabel dan definisi operasional variabel, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

BAB IV : Analisis Dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis dari penelitian yang dilakukan, pembahasan, dan pembuktian hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan memberikan saran berdasarkan kesimpulan penelitian untuk mengkaji kebenaran hipotesis yang sudah ada.